

ABSTRAK

Arisan PKK di Desa Cangu kecamatan Badas Kabupaten Kediri merupakan kegiatan simpanan masyarakat. Hal yang menarik untuk dibahas dan menjadi tujuan penelitian ini adalah mengenai kejelasan akad dan status potongan yang dikenakan atas uang yang diterima pemenang undian dalam perspektif Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan fakta. Metode analisis data menggunakan sifat analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik arisan dalam penerapan akad simpanan tidak terpenuhi karena praktiknya uang yang ditarik lebih besar daripada yang disimpan hal ini menimbulkan hutang dan menjadikan *gharar* pada *akad*. Selain itu pengenaan potongan wajib yang ditetapkan sepihak oleh pengurus dan tidak adanya transparansi hal ini menimbulkan *ghibah* sesama anggota. pengenaan potongan yang diambil sebelum diserahkan kepada pemenang undian terlebih dahulu sehingga mempengaruhi nilai hutang dan mengarah pada *riba qordh*. Pemenang undian terakhir juga terdapat potongan saat penerimaan nilai piutang sebelum diserahkan hal ini mengarah pada perbuatan *bathil*. Sebaiknya pelaksanaan arisan PKK memperjelas *akad* yang digunakan dengan tidak menggunakan istilah simpanan karena praktiknya mengarah pada *qordh* (hutang). Sebaiknya pengambilan potongan tidak dilakukan sepihak melainkan kesepakatan pengurus dan anggota dan dibayarkan setelah terjadinya serahterima. Dengan demikian, akad penerimaan uang arisan dan pengenaan biaya administrasi adalah dua *akad* yang berbeda.

Kata Kunci: Arisan, *Akad*, Simpanan, *qordh*, Potongan.

ABSTRACT

Regular Social Gathering (Arisan PKK) in Canggu Village, Badas District, Kediri Regency is a community saving activity. The interesting thing to discuss and be the aim of this research is about the clarity of the contract and the status of the deductions imposed on the money received by lottery winners in the perspective of Islamic Law. The research method that used in this research is empirical law research using factual approach. Data analysis method uses descriptive analysis. The result of this research shows that practice of Regular Social Gathering (Arisan PKK) is not fulfilled because the practice of repaying money is greater than the one stored. This incited debt and made *gharar* of the contract. In addition, the imposition of mandatory deductions that are determined unilaterally by the management and the lack of transparency, this creates *ghibah* among the members. Imposition of deductions taken before being handed over to the winner of the lottery first so that it affects the value of the debt and leads to *riba qordh*. The winner of the last lottery also deduced on the receiving of the credit before submission to a debt that leads to *bathil*. Supposedly, the implementation of Regular Social Gathering (Arisan PKK) explains the contract used by not using saving terms because of the practice lead to *qordh* (debt). Supposedly, the deduction is not done unilaterally but the agreement of the management and members and paid after the handover. Thus, the contract of receiving Arisan money and administrative costs are two different contracts.

Keywords: Regular Social Gathering, *Contract*, Saving, *qordh*, Deductions .